

MAKRO

Tarif Terintegrasi TransJakarta, MRT dan LRT Disetujui Rp10 Ribu

NERACA

Jakarta – Komisi B DPRD DKI Jakarta menyetujui rekomendasi tarif integrasi tiga moda transportasi umum, yakni TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta dengan nominal sebesar Rp10 ribu. "Komisi B menyetujui pelaksanaan tarif integrasi karena mendukung keterpaduan moda transportasi," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail di Gedung DPRD DKI di Jakarta, Selasa (7/6).

Wakil rakyat DKI di Kebon Sirih, Jakarta Pusat itu yakin tarif integrasi tiga moda transportasi umum tersebut bakal menggeser pola masyarakat menggunakan kendaraan pribadi ke angkutan massal. Meski menyetujui usulan integrasi tarif termasuk besaran tarif sebesar Rp10 ribunya, pihaknya menginginkan ada evaluasi setiap tiga bulan selama satu tahun.

Tujuannya, kata dia, untuk mengetahui dampak implementasi tarif integrasi terhadap minat masyarakat menggunakan moda transportasi massal. Komisi B DPRD DKI juga merekomendasikan Pemprov DKI dan BUMD bidang jasa transportasi massal untuk mencatat jumlah pengguna integrasi tarif itu yang juga setiap tiga bulan dalam satu tahun dengan pemisahan warga KTP DKI dan non-KTP DKI Jakarta.

Rekomendasi lainnya, lanjut dia, agar penerima manfaat integrasi tarif itu diperluas juga untuk 16 kelompok masyarakat di DKI agar mereka gratis menerima integrasi tarif itu. Adapun 16 kelompok masyarakat itu di antaranya PNS DKI, pensiunan PNS DKI, tenaga kontrak DKI, penerima Kartu Jakarta Plus (KJP).

Kemudian, karyawan swasta tertentu, penghuni rumah susun, warga KTP Kepulauan Seribu, penerima beras miskin, anggota TNI-Polri, veteran, penyandang disabilitas, warga lanjut usia, marbot masjid dan mushola, PAUD, jumatik, hingga PKK. Walau pihaknya menyetujui dan memberikan rekomendasi, namun hal itu masih belum final dan membutuhkan masukan dari legislatif dan eksekutif. "Jadi bukan setelah saya bacakan kemudian final tapi ini seharusnya buka ruang untuk menyempurnakan draft ini," ucapnya. ●bari

Pemerintah Targetkan 16 Jalan Tol Baru Selesai Tahun Ini

NERACA

Jakarta – Pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan dapat menyelesaikan pembangunan 16 jalan tol baru pada 2022 sepanjang 332 kilometer. "Pada 2022 yang telah diresmikan empat ruas jalan tol sepanjang 42,9 kilometer (km). Kemudian rencana penyelesaian konstruksi jalan tol yang siap diresmikan pada 2022 sepanjang 332 km," kata Kepala BPJT Kementerian PUPR Danang Parikesit dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (7/6).

Jika dihitung selain 16 jalan tol yang akan diresmikan pada 2022, total pengoperasian ruas jalan tol di Indonesia secara keseluruhan telah mencapai sepanjang 2.500 km hingga Juni 2022. Total panjang tol 2.500 km tersebut terbagi menjadi 66 ruas jalan tol dari 46 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang ada di Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan hingga Pulau Sulawesi. Pada akhir 2022 pemerintah menargetkan jalan tol yang beroperasi dapat mencapai 2.955 km. "Sehingga di tahun 2024 mendatang, total panjang jalan tol operasional akan mencapai 4.761 km," ujar Danang.

Adapun sebanyak 16 jalan tol yang ditargetkan dapat diresmikan pada 2022 sebagai berikut : Jalan Tol : Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu seksi Bengkulu-Taba Penanjung dengan panjang 16,7 km. Jalan tol: Cibitung-Cilincing Seksi 2-3 (Telaga Asih-Tarumajaya) dengan panjang 24,65 km. Jalan tol: Serpong-Cinere Seksi 2 (Pamulang-Limo) dengan panjang: 3,6 km.

Selanjutnya jalan tol: Cinere-Jagorawi Seksi 3 (Limo-Kukusan) dengan panjang: 5,5 km. Jalan tol: Bekasi-Cawang-Kampung Melayu seksi 1A, 2A, dan 2A-Ujung dengan panjang: 6,6 km. Jalan tol: Serpong-Balaraja Seksi 1A dengan panjang: 5,2 km. Jalan tol: Jakarta-Cikampek II Selatan Paket 3 (Kutanegara-Sadang) dengan panjang 8,5 km. Jalan tol: Padang-Pekanbaru seksi Pekanbaru-Bangkinang dengan panjang: 31 km. Jalan tol: Cilennyi-Sumedang-Dawuan seksi 2 sampai dengan 6 dengan panjang: 49,3 km. Jalan tol: Sigli-Banda Aceh seksi 1,5, dan 6 dengan panjang: 38,2 km. ●bari



NERACA/Antarfoto/Rivan Awal Lingga/Com
PAMERAN UMKM KEMENKEU SATU : Petugas menyimulasikan pembuatan biosolar dari minyak kelapa sawit pada Pameran Pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu di Jakarta, Selasa (7/6/2022). Kemenkeu melalui Program Kemenkeu Satu terus berkomitmen mendukung pemberdayaan UMKM, termasuk di sektor kelapa sawit, guna mencari solusi terhadap hambatan yang ada sehingga bisa terselesaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Laba Bersih BUMN 2021 Melonjak Drastis Jadi Rp126 Triliun

Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menyampaikan total laba bersih perusahaan pelat merah di Indonesia mencapai Rp126 triliun sepanjang tahun 2021. "Total pendapatan BUMN Rp1.983 triliun atau setara 99 persen dari pendapatan APBN," ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR Jakarta, Selasa (7/6).

■ NERACA

Menteri Erick mengatakan perbaikan kinerja perusahaan-perusahaan melalui program transformasi juga berdampak positif terhadap kontribusi untuk negara. Ia menurunkan total pajak, dividen, dan penerimaan negara bukan pajak yang diberikan BUMN secara konsolidasi mencapai

Rp371 triliun. Menteri Erick optimistis setoran dividen akan kembali normal setelah pandemi nanti. "Alhamdulillah laba 2021 dibandingkan tahun sebelumnya yang tadinya Rp13 triliun sekarang dengan segala efisiensi dan perbaikan model bisnis yang didukung Komisi VI DPR RI, laba untuk 2021 sebesar Rp126 triliun. Ini adalah

prestasi yang saya rasa luar biasa," kata Erick.

Menteri Erick mengajukan penambahan anggaran Kementerian BUMN untuk 2023 sebesar Rp79,7 miliar atau menjadi Rp311 miliar dari sebelumnya yang hanya sebesar Rp232 miliar. Ia menyebut pagu indikatif yang diberikan kepada Kementerian BUMN menjadi yang terkecil dibandingkan seluruh kementerian. Meski begitu, Erick menegaskan Kementerian BUMN tetap bekerja secara efisien dan kalkulasi.

"Jika tidak keberatan, kami menginginkan bisa tetap dijaga di angka Rp300-an miliar, tidak terus menerus menurun seperti hari ini yang Rp194 miliar.

Apalagi kalau melihat

amanah yang diberikan Komisi VI DPR RI yang mana kami terus bisa memastikan pembukaan lapangan kerja, melakukan pendampingan kepada UMKM, dan terus juga menjaga proyek strategis nasional," jelas Erick.

Apabila dibandingkan dengan total aset yang dikelola oleh BUMN mencapai Rp8.998 triliun, maka pagu itu sangat kecil mengingat beban yang dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan pelat merah. Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam mengapresiasi capaian Kementerian BUMN dalam meningkatkan kinerja perusahaan-perusahaan pelat merah meski di tengah tantangan pandemi. Menurutnya, ia berharap melanjutkan sejumlah target. ●bari

Pemerintah Klaim Program Substitusi Biomassa Tingkatkan Bauran EBT

NERACA

Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim program substitusi biomassa atau co-firing pada pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara akan meningkatkan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 1,8 persen. "Program co-firing ini akan meningkatkan bauran EBT sekitar 1,8 persen melalui substitusi sebagian

batu bara dengan biomassa sampai dengan kurang lebih 10 persen," kata Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Edi Wibowo dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Selasa (7/6).

Pemerintah Indonesia menggunakan biomassa sebagai substitusi bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara untuk mempercepat pemanfaatan EBT menuju target 23 persen pada tahun 2025. Program co-firing sejalan dengan

upaya Indonesia menuju target netralitas karbon pada tahun 2060.

Kementerian ESDM memproyeksikan kebutuhan biomassa untuk cofiring sekitar 10,2 juta ton per tahun pada 2025 dan implementasi program itu akan memberikan dampak terhadap penurunan emisi sekitar 11 juta ton karbon dioksida. Edi menyampaikan cofiring tak hanya meningkatkan kontribusi EBT pada bauran energi nasional,

tetapi juga berdampak positif kepada pengembangan ekonomi kerakyatan.

"Program co-firing merupakan bagian dari ekosistem listrik kerakyatan dan land preservation program yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan biomassa, sehingga sekaligus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi setempat karena membuka lapangan kerja dan peluang bisnis di sektor biomassa," jelas Edi. ●bari

BURSA & FINANSIAL

Kebijakan Pangan-Perdagangan Minimalkan Dampak Ketidakpastian

NERACA

Jakarta – Lembaga Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyebutkan kesinambungan antara kebijakan pangan dengan kebijakan perdagangan pangan dapat meminimalkan dampak ketidakpastian global terhadap fluktuasi harga pangan di Tanah Air. "Fluktuasi harga pangan di Tanah Air kini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada pada sektor pertanian kita, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor global karena kini semuanya saling terhubung. Untuk itu, kebijakan yang diambil perlu komprehensif dan memperhatikan kepentingan semua pihak," kata Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (7/6).

Menurutnya, pemerintah perlu terus fokus pada kebijakan yang berorientasi pada peningkatan produktivitas pangan dalam negeri seperti meningkatkan intensifikasi, membuka akses petani kepada input pertanian berkualitas, dan membuka kesempatan investasi pada sektor pertanian supaya terjadi transfer teknologi dan modernisasi. Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga perlu menjaga komitmennya terhadap perdagangan internasional, tidak menjalankan kebijakan yang proteksionis dan mengurangi hambatan-hambatan non-tarif yang dapat mempengaruhi kestabilan harga, dan kecukupan stok pangan di pasar.

Felippa berpendapat bahwa perdagangan internasional perlu tetap dijalankan sembari menjalankan kebijakan yang fokus pada peningkatan produktivitas pangan dalam negeri. Modernisasi pertanian dan transfer teknologi, katanya, juga akan berdampak positif kepada para petani dan kesejahteraan yang diharapkan bisa membuat ongkos produksi lebih efisien dan meningkatkan kualitas pangan yang dihasilkan.

CIPS menyebutkan perdagangan pangan internasional harus tetap berjalan untuk mencegah terjadinya krisis pangan. Langkah Indonesia yang sempat menghentikan ekspor crude palm oil (CPO) dan langkah India menghentikan ekspor gandum disebut kontraproduktif terhadap tujuan tersebut, apalagi jika menginspirasi negara lain untuk melakukan pembatasan ekspor masing-masing komoditasnya.

Menurut Felippa, kebijakan perdagangan idealnya perlu semakin terbuka dan tidak proteksionis terutama dalam menyikapi dampak pandemi. Dia mengatakan bahwa semua negara perlu terhubung dalam perdagangan pangan guna memperkecil terjadinya krisis pangan, yang mungkin sudah dimulai dengan adanya perubahan iklim. ●bari

BPN Terbitkan 34 Juta Sertifikat Tanah

NERACA

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djaili mengatakan sebanyak 34 juta sertifikat tanah dibuat sepanjang 2017 sampai akhir Mei 2022 sehingga total terdapat 80 juta sertifikat tanah yang telah dibuat.

"Kita mulai pendaftaran untuk pembuatan sertifikat tanah di 2017. Tapi 2017 sudah terdapat 46 juta sertifikat tanah, jadi dari 2017 sampai sekarang sudah bertambah sekitar 34 jutaan sertifikat," kata Sofyan dalam konferensi pers yang dipantau di Jakarta, Selasa (7/6).

Percepatan pembuatan sertifikat tanah ini sesuai dengan perintah Presiden Jokowi agar pemilik tanah mendapatkan kepastian hukum. Perluasan sertifikasi tanah juga diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, mengingat sertifikat tanah bisa digunakan sebagai jaminan saat mengakses layanan lembaga keuangan formal seperti perbankan.

Berdasarkan catatan Kementerian ATR/BPN, Sofyan menyebutkan baru 8 juta sertifikat tanah yang dijadikan jaminan untuk mengakses layanan keuangan formal. Nilai itu baru mencapai 10 persen dari total sertifikat tanah di Indonesia yang sebanyak 80 juta.

"Kalau 80 juta sertifikat tanah semua bisa di-leverage untuk kepentingan ini (diadakan jaminan untuk mendapatkan layanan keuangan formal) luar biasa dampak ekonominya. Dan kami punya keinginan untuk mendaftarkan semua tanah di Indonesia," katanya. ●bari


PT PUTRA MANDIRI JEMBAR Tbk
Berkedudukan di Jakarta Pusat
("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") dan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis/30 Juni 2022
Waktu : Pukul 14.00 s/d selesai
Tata Cara Pelaksanaan Rapat : diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan *Electronic General Meeting System* yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")
Tempat : Dipo Business Center, Jl. Gatot Subroto Kav. 51-52, Jakarta 10260

Mata Acara Rapat dan Penjelasan

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Persetujuan atas Pengumuman Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan yang berakhir di tanggal 31 Desember 2022; dan
4. Penetapan remunerasi dan bonus kepada anggota Direksi dan remunerasi kepada anggota Dewan Komisaris.

Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut:
Mata acara 1 sampai 4 adalah mata acara Rapat yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di mana terhadap mata acara tersebut harus memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Rapat.


Sehubungan dengan Pandemi Covid-19 dan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ("PPKM") serta dalam rangka menaati peraturan yang berlaku sebagai berikut:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan
- c. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Kondisi tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik

Ketentuan penyelenggaraan Rapat adalah sebagai berikut:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui *website* Perseroan, *website* Bursa Efek Indonesia dan *website* KSEI serta di Harian Ekonomi Neraca tanggal 24 Mei 2022.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham, dan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 7 Juni 2022 dan/atau pemilik saldo rekening efek pada Penutupan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 7 Juni 2022.
4. Pelaksanaan Rapat akan diadakan secara elektronik, menggunakan *Electronic General Meeting System* yang disediakan KSEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Sehubungan dengan penerapan prosedur kesehatan selama pandemi Covid-19, Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik telah mengikuti vaksinasi anti-covid 19 secara lengkap.
6. Perseroan menyarankan kepada para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik ("*E-Proxy*") melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* dan menghadiri Rapat secara *online* melalui situs web eASY.KSEI https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan KSEI. *E-Proxy* dapat dilakukan paling lambat hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 pukul 12.00 WIB.
7. Pertanyaan saat Rapat dapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia dalam layar "*E-Meeting Hall*" di aplikasi eASY.KSEI. Untuk peserta Rapat yang hadir secara fisik dapat menyampaikan pertanyaan secara tertulis pada lembar pertanyaan yang disediakan Perseroan.
8. Perseroan tidak akan menyediakan dan membagikan bahan Rapat dalam bentuk cetak. Seluruh informasi dan bahan Rapat tersedia bagi Pemegang Saham pada situs Perseroan https://www.ptpmj.co.id/ sejak tanggal pengumuman sampai dengan Rapat diselenggarakan.
9. Notaris yang dibantu oleh Badan Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia yang akan memastikan keabsahan penuntutan suara untuk masing-masing agenda berdasarkan suara yang diberikan oleh Pemegang Saham.

Jakarta, 8 Juni 2022
Direksi


PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) 2021
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS LB)
PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO TBK

Direksi PT Sigma Energy Compressindo Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada :

Hari, tanggal : Kamis, 30 Juni 2022
Tempat : Century Park Hotel – Ksatria Arya Wira Room, Jl.Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270
Waktu : 14.00 WIB s.d. 16.00 WIB

Agenda RUPST adalah sebagai berikut :

1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- b. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penambahan Bidang Usaha pada Anggaran Dasar Perseroan, KBLI 28130 – Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2022.
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham

Agenda RUPS LB adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST dan RUPS LB adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam RUPST dan RUPS LB, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
4. Dengan memperhatikan himbauan Pemerintah Republik Indonesia untuk menjaga jarak (Physical Distancing) terkait dengan perkembangan terkini penyebaran COVID-19 di Indonesia dan sebagai langkah pencegahan penyebaran lebih lanjut serta keterbatasan tempat acara, Perseroan sangat menghimbau kepada pemegang saham yang tidak bisa hadir untuk memberikan kuasanya baik melalui e-proxy yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") maupun Formulir Surat Kuasa yang dapat diperoleh selama jam kerja di :

Alamat Korespondensi Perseroan
PT Sigma Energy Compressindo Tbk
GKM Green Tower Lt.10
Jl.TB. Simatupang Kav.89/3, Jakarta Selatan 12520
Telp. (021) 27878092;
Faks. (021) 27878090
Email: corpsec@sinerco.co.id

Kantor Biro Administrasi Efek
PT Sharestar Indonesia
Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B, Lantai 19
Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10, 1-6
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Telp: 62 21 50815211

5. a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
- b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa dokumen yang menunjukkan kewenangan mereka untuk mewakili Pemegang Saham (seperti fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir).
6. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Korespondensi Perseroan, pada setiap jam kerja terhitung sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan terbnyanya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 8 Juni 2022
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kami Direksi PT Global Internusa Prima, berkedudukan di Jakarta ("**Perseroan**"), dengan ini mengumumkan rencana pengambilan saham yang akan diterbitkan Perseroan oleh calon pembeli (investor) pihak ketiga, yakni PT Petindo Jaya Kreasi, berkedudukan di Jakarta Barat dan Halimhera Capital Pte Ltd, berkedudukan di Singapura, yang menyebabkan perubahan pendudukan dalam Perseroan dan karenanya merupakan pengambilalihan Perseroan ("**Pengambilalihan**"). Bagi pihak-pihak yang berkepentingan atas Pengambilalihan tersebut dapat menghubungi kantor Perseroan yang beralamat di Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan, Indonesia. Apabila setelah lewat 14 hari sejak tanggal pengumuman ini Perseroan tidak menerima keberatan apapun atas rencana Pengambilalihan tersebut, maka pihak-pihak yang berkepentingan dianggap telah menyetujui dilakukannya Pengambilalihan.

Jakarta, 8 Juni 2022
Direksi
PT Global Internusa Prima

PENGUMUMAN
PT OWARI SEIKI INDONESIA

Para pemegang saham PT OWARI SEIKI INDONESIA, berkedudukan di Kabupaten Karawang (Perseroan), sebagaimana termuat dalam Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT OWARI SEIKI INDONESIA tanggal 6 Juni 2022, telah memutuskan bahwa pembayaran atas tagihan dari Owari Precise Products Co., Ltd. kepada Perseroan akan dikonversikan menjadi setoran modal oleh Owari Precise Products Co., Ltd. atas saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan terhadap struktur permodalan Perseroan.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 8 Juni 2022
Direksi PT OWARI SEIKI INDONESIA

PENGUMUMAN

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham tertanggal 03 Juni 2022 yang dituangkan dengan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham tertanggal 07 Juni 2022 Nomor 16, yang dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, Perseroan Terbatas PT POST ASSET MANAGEMENT INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Pusat, telah dibubarkan. Keberatan dan/atau sanggahan agar diajukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung setelah pengumuman ini kepada :

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
qq. Direktur Perdana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
J.H.R. Rasuma Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan.
Jakarta, 08 Juni 2022
Likuidator
PT POST ASSET MANAGEMENT INDONESIA
(dalam likuidasi)